

ABSTRAK

Perkara wanprestasi pada akad *murabahah bil wakalah* pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph terdapat permasalahan terkait alat bukti serta penggunaan dasar hukum menggunakan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima alat bukti akad *murabahah bil wakalah* pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph dan menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan pembuktian pada perkara ekonomi syariah pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen. Metode analisis yang digunakan yakni secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph bahwa kelengkapan alat bukti pada akad *murabahah bil wakalah* seharusnya tidak dapat diterima karena tidak adanya bukti pembelian berupa kuitansi sehingga adanya rukun yang tidak terpenuhi yakni pada objek pada akad *murabahah bil wakalah* tidak disebutkan barangnya berupa apa, dalam akad *murabahah bil wakalah* disebutkan investasi dan modal kerja yang mengakibatkan tidak sahnya akad *murabahah bil wakalah* sehingga, wanprestasi yang dilakukan oleh Ade Yanti menjadi akad *qardh* dengan catatan hanya membayar hutang pokoknya saja, serta penggunaan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai pedoman materiil perkara ekonomi syariah dan untuk memperlancar dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah.

Kata kunci : akad, *murabahah bil wakalah*, pembuktian, wanprestasi

ABSTRACT

The issue of default in the murabahah bil wakalah agreement with an agency in Descision Number 1/Pdt.G.S/PA.Nph involves problems related to evidence and the legal basis using Articles 1320 and 1337 of the Civil Code as the judges consideration. Therefore, this study is conducted to analyze the judges considerations in accepting the evidence of the murabahah bil wakalah aggrement with agency Decision No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph and to analyze the legal basis used in the evidentiary consideration in the syariah economic case in Decision No.1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph.

The research method used normative. The approach taken is legislative approach and case study, utilizing primary legal sources nd secondary legal sources, employing library and document collection techniques. The analysis method used is prescriptive.

The result of this study indicate that the decision Number 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph highlihts that the completeness of evidence in a murabahah bil wakalah contract sholud no be accepted due to the absence of proof of purchase in the form of receipts, leading to unmet conditions regarding the object of the murabahah bil waklaah contract, in which the item is not specified. The murabahah bil wakalah contract refers to investment and working capital, resulting in the invalidity of the murabahah bil wakalah contract, thus make Ade Yanti's deafult a qardh contract with the note that only the principal debt needs to be repaid. Additionally, the application of Articles 1320 and 1337 of the Ciil Code cannot be justified a it contradicts the purpose of the establishmentof the supreme court regulation Number 2 of 2008 on the Compilation of Islamic Economic Law, which serves as the substantive guidelines for Islamic economic cases and to fascilitate the examination of Islamic economic matters.

Keywords: contract, deafult, evidence, murabahah bil wakalah